

## PILGUB JABAR DAN PROVINSI CIREBON

Oleh: Muradi\*

Menjelang pencoblosan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) pada tanggal 24 Februari 2013 mendatang, sejumlah isu sensitif yang mengiringi proses hajatan politik di Tatar Pasundan masih terus mengemuka, diantaranya adalah pembentukan Provinsi Cirebon. Lima kandidat yang maju dalam Pilgub Jabar juga menyikapinya beragam, ada yang sekedar bersikap pragmatisme belaka untuk meraup dukungan suara dari wilayah Cirebon Raya atau Ciayumajakuning (Cirebon baik kabupaten maupun kota, Indramayu, Majalengka dan Kuningan), ada pula yang secara implisit mendukung, ada juga yang tidak bersikap. Situasi tersebut mengingatkan kita pada pelaksanaan Pilgub 2008 lalu, di mana tiga kandidat yang bertarung saat itu mendukung pembentukan Provinsi Cirebon, terpisah dari Provinsi Jawa Barat. Tak heran, saat Ahmad Heriawan dan Dede Yusuf yang pecah kongsi dan masing-masing maju sebagai calon gubernur pada Pilgub kali ini ditagih janji politiknya terkait dukungan keduanya saat menjadi pasangan kandidat pada Pilgub Jabar 2008 lalu.

Desakan pembentukan Provinsi Cirebon yang terus menguat seiring dengan pelaksanaan Pilgub Jabar 2013 ini mengindikasikan bahwa desakan pembentukan provinsi yang terpisah dari Jawa Barat tak lebih dari sekedar pembangunan daya tawar politik sejumlah elit politik setempat terhadap sejumlah kandidat yang diprediksi menang pada Pilgub kali ini. Indikator penguatnya adalah adanya penolakan justru dari daerah yang diklaim akan menjadi bagian dari provinsi yang akan dibentuk, seperti dari Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Majalengka. Praktis klaim dukungan lima kabupaten/kota tersebut tidak bulat, apalagi prasyarat untuk pengajuan pembentukan provinsi yang terpisah dari provinsi induk adalah minimal lima kabupaten dan kota dengan sendirinya tidak dapat terealisasi.

Selain itu, problematika klasik yang terus menjadi alasan bagi pembentukan Provinsi Cirebon adalah perhatian yang minim dari pimpinan daerah di Bandung atas dinamika sosial dan ekonomi yang relatif masih tidak baik dibandingkan dengan kabupaten/kota di wilayah lain di Jawa Barat. Namun hal tersebut tentu tidak beralasan, mengingat hal yang sama juga dialami oleh masyarakat di Jawa Barat bagian selatan, yang tentu juga perhatian lebih dari pimpinan di Bandung. Dengan kata lain, masalah pemerataan pembangunan di Jawa Barat masih menjadi pekerjaan rumah setiap pasangan gubernur dan wakil gubernur yang terpilih kelak.

Sementara masalah perbedaan budaya juga menjadi alasan penguat bagi pembentukan Provinsi Cirebon. Perbedaan kultur antara Jawa Barat yang didominasi oleh kultur priangan dengan wilayah Ciayumajakuning yang cenderung memiliki kekhasan budaya dan berbeda dengan Jawa Barat menjadi bagian yang sulit dilepaskan dari pembentukan Provinsi Cirebon ini.

---

\* Penulis adalah Staf Pengajar Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran, Bandung.  
Alamat: Jl. Saturnus Utara XIV No. 1, Bandung. Nomor Kontak: 022-7500371 atau 081384330813 (mobile). Email : [muradi.clark@unpad.ac.id](mailto:muradi.clark@unpad.ac.id). Rek BCA No. 111-111-0781

Perasaan berbeda dari provinsi induk ini menjadi bagian dari pembangunan sentimen yang terus direproduksi guna mendapatkan dukungan dari publik di lima kabupaten dan kota tersebut.

### **Kerikil di 'Sepatu' Provinsi Jawa Barat?**

Belajar dari pemisahan Provinsi Banten lebih dari satu dekade lalu, harusnya para kandidat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dan DPRD provinsi lebih hati-hati dalam menyikapi tuntutan tersebut. Solusi pemisahan dari provinsi induk tidak serta merta membawa kesejahteraan yang paripurna. Justru permasalahan demi permasalahan baru menjadi pekerjaan rumah bagi provinsi yang memisahkan diri tersebut. Kunci dari tuntutan pembentukan provinsi baru tersebut adalah pada pemerataan pembangunan dan pelibatan secara utuh elit politik lokal dalam setiap pengambilan keputusan terkait dengan pembangunan kewilayahan, di mana selama ini dianggap oleh elit politik lokal yang mengkampanyekan tuntutan pembentukan provinsi baru pemerintah provinsi alpa dalam konteks tersebut.

Mengabaikan tuntutan pemisahan dari provinsi induk adalah solusi instan yang sama sekali tidak memiliki basis politik yang kuat bagi jawaban atas minimnya kesejahteraan rakyat dan pemerataan pembangunan. Provinsi Banten adalah bagian dari solusi instan yang tidak menjawab permasalahan dasar dari tuntutan tersebut, paling tidak hingga saat ini. Dengan kata lain, tuntutan pembentukan Provinsi Cirebon harus dilihat secara komprehensif dan menyeluruh tidak sekedar menjawab permasalahan dengan masalah baru.

Dalam konteks ini juga ditegaskan bahwa para kandidat Cagub dan Cawagub pada Pilgub Jabar ini tidak memanfaatkan momentum politik semata untuk sekedar dukung mendukung dan setuju atas tuntutan tersebut. Apalagi bila mengacu pada UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah, esensi otonomi daerah justru di kabupaten/kota, dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) hanya menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dengan kata lain Pemprov justru harus banyak menstimulasi agar pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat lebih pro aktif dalam pengupayaan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan di wilayahnya. Sehingga, masalah pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat di masing-masing wilayah menjadi tanggung jawab dari pimpinan di kabupaten dan kota.

Pemprov sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat menjadi penegas agar sejumlah bantuan dan dukungan yang bersumber dari pemerintah pusat dapat terdistribusi merata dengan baik ke kabupaten dan kota tersebut. Penekanan hal tersebut juga berlaku bagi DPRD provinsi, di mana tuntutan atas pemisahan provinsi baru dari provinsi induk tidak terpolitisasi oleh kepentingan politik jangka pendek semata.

Sehingga tuntutan pembentukan provinsi baru yang terpisah dari provinsi induk tidak akan lagi menjadi kerikil dalam 'sepatu' provinsi Jawa Barat, karena penanganan atas tuntutan tersebut dilakukan dengan

pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan, yang mana menjadi pekerjaan rumah bagi siapa saja yang akan memenangkan Pilgub Jabar kali ini. Karenanya, dibutuhkan visi dan sikap yang lebih terintegral dari para kandidat Cagub dan @wagub pada Pilgub Jabar untuk mengupayakan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap wilayah di Jawa Barat. Dengan begitu, permasalahan yang diungkap dan menjadi tuntutan masyarakat untuk pembentukan provinsi baru tidak lagi menjadi arus utama dan isu semata, tapi terintegrasi dalam program siapapun yang akan memenangkan kontestasi lima tahunan di Jawa Barat tersebut.